

**EFISIENSI PROSEDUR EKSPOR PADA INDUSTRI PENGOLAHAN  
IKAN KALENG DI KOTA BITUNG***EFFICIENCY OF EXPORT PROCEDURE IN CANNED FISH PROCESSING INDUSTRY IN  
BITUNG CITY*

Oleh:

**Theresia S. Luisan<sup>1</sup>**  
**Magdalena Wullur<sup>2</sup>**  
**Jessy J. Pondaag<sup>3</sup>**<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen  
Universitas Sam Ratulangi

e-mail:

<sup>1</sup> [16061102021@student.unsrat.ac.id](mailto:16061102021@student.unsrat.ac.id)<sup>2</sup> [Wullurmagdalen@yahoo.com](mailto:Wullurmagdalen@yahoo.com)<sup>3</sup> [jjpondaag@unsrat.ac.id](mailto:jjpondaag@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pihak apa saja yang terlibat dan sistem pengurusan dokumen perijinan ekspor di Kota Bitung dengan berlakukannya NSW pengurusan dokumen menjadi lebih efektif dan efisien atau tidak. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan *design* deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dengan melakukan wawancara pada dua perusahaan pengolahan ikan kaleng yang berada di Kota Bitung serta data sekunder yang di dapatkan dari berbagai sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan pengurusan dokumen ekspor yang di lakukan secara *online* (NSW) memudahkan para eksportir. Di Kota Bitung proses pengurusan dokumen perijinan melalui Mal Pelayanan Publik dan juga Terintegrasi dengan OSS sehingga proses pengurusan dokumen ekspor dapat berlangsung secara efisien karena cepat, transparan, dan di lakukan dalam satu tempat.

Kata kunci: Efisiensi, Prosedur, Ekspor, Indurtri Pengolahan Ikan Kaleng, NSW

**Abstract:** *This study aims to find out what parties are involved and the system for handling export licensing documents in Bitung City and with enforcing the NSW, document processing becomes more effective and efficient or not. The research method used is qualitative analysis with descriptive design. The data source in this study is primary data by conducting interviews with two fish processing companies sent in Bitung City and secondary data obtained from various sources. The results of this study indicate that the handling of export documents carried out online (NSW) provides exporters. In the Bitung City the processing of documents through the Public Service Mall and also Integrated with OSS so that, the process of export documents can be done efficiently, quickly, and done in one place.*

**Keywords:** *Efficiency, Procedure, Export, Canned Fish Processing Industry, NSW*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tahun 2019 pemerintah mulai mencetuskan adanya simplifikasi pada penyederhanaan prosedur ekspor guna mempermudah pelaksanaan ekspor untuk mengefisiensi biaya dan waktu pemeriksaan yang lebih cepat (Inggar, 2019). Dalam praktek perdagangan internasional selain aspek infrastruktur transportasi dan logistik, aspek non-infrastruktur seperti administrasi dan birokrasi merupakan salah satu faktor penunjang dalam menunjang daya saing ekspor. Kelengkapan dokumen kepabeanan baik eksportir maupun importir merupakan hal yang sangat penting. Rumit dan lambatnya prosedur proses pengurusan dokumentasi barang ekspor dengan berhadapan langsung (*head to head*) merupakan salah satu hambatan kelancaran arus barang (Parikesit, dkk, 2018).

Dukungan *NSW* pada sistem penanganan layanan kepengurusan dokumen yang terintegrasi merupakan hal yang efektif dan efisien sebagai wujud nyata pelayanan birokrasi *modern* dan telah diterapkan oleh negara-negara maju lainnya (Hariyono, 2016). Penyederhanaan proses prosedur pengurusan baik barang maupun administrasi tentunya memiliki peran penting dalam lingkup Manajemen Operasional khususnya dalam aliran informasi atau prosedur yang dilaksanakan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia yang memiliki potensi sumber daya laut dan perikanan yang begitu besar untuk menggerakkan perekonomian di dalamnya. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengekspor produk perikanan di dunia. Produk ekspor perikanan terdiri dari produk perikanan tanpa olahan dan olahan. Ikan kaleng merupakan salah satu hasil produk perikanan olahan yang ada di Indonesia. Provinsi Sulawesi Utara khususnya Kota Bitung merupakan *home base* berkembangnya industri pengolahan ikan berbahan baku Tuna, Cakalang, dan Tongkol (TCT). Sebagai kota tempat terkonsentrasinya pengalengan ikan berbahan baku ikan tuna yang ada di Indonesia, sektor industri pengolahan ikan kaleng sangat berperan penting untuk menggerakkan perekonomian di sekitarnya di mana industri pengolahan (*processing industry*) menyerap tenaga kerja lokal yang cukup besar (Tuerah, 2019).

Berdasarkan data Bea Cukai Bitung terkait ekspor ikan kaleng Tahun 2017 sampai Bulan Mei Tahun 2019 terjadi peningkatan volume ekspor industri ikan kaleng di Kota Bitung dari 12.200 Ton di Tahun 2017 menjadi 12.705 Ton Tahun 2018. Sepanjang Tahun 2019 sampai bulan Mei volume ekspor ikan kaleng berbahan baku ikan Tuna sebanyak 6.765 Ton. Nilai devisa yang dihasilkan pada Tahun 2018 sebesar US\$ 118,3 juta, pada bulan Mei Tahun 2019 sebesar US\$ 24,6 juta. Salah satu faktor terjadinya peningkatan ekspor ikan kaleng di Tahun 2018 Indonesia mengekspor ikan kaleng ke 86 negara tujuan ekspor ikan tuna kaleng (APIKI, 2018 dalam Tuerah, 2019). Hal ini merupakan peluang dalam mendorong produktivitas ekspor.

Dalam meningkatkan produktivitas ekspor aspek infrastruktur seperti jalur konektivitas (jalan, pelabuhan, dan jasa logistik kepabeanan) dan aspek non-infrastruktur seperti prosedur ekspor yang mudah, rantai birokrasi yang sedikit, regulasi yang baik serta terintegrasi sehingga pengurusan dokumen menjadi efisien merupakan faktor penunjang bagi perusahaan untuk melakukan ekspor.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pihak apa saja yang terlibat dan sistem pengurusan dokumen perijinan ekspor di Kota Bitung dengan berlakukannya *NSW* pengurusan dokumen menjadi lebih efektif dan efisien atau tidak.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Efisiensi

Efisiensi sebuah prosedur dapat meningkatkan produktifitas. Menurut Soekartawi (2003) dalam Fitriana (2018) Efisiensi dibagi menjadi 3 (tiga bagian) yaitu efisiensi teknis, efisiensi harga (alokatif), dan efisiensi ekonomi. Efisiensi teknis yaitu kombinasi antara produksi yang sebenarnya dengan produksi yang maksimum dari jumlah *input* dan teknologi. Efisiensi harga dapat tercapai dengan memaksimalkan keuntungan dimana nilai produk marginal sama dengan harga faktor produksi. Efisiensi ekonomi yaitu mampu menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan *input* dan biaya tertentu, efisiensi ekonomi tidak akan tercapai apabila efisiensi harga dan teknis tercapai.

### Perdagangan Internasional

Globalisasi menyebabkan meningkatnya pertumbuhan perdagangan internasional, di mana setiap negara dapat melakukan ekspor produknya ke berbagai negara dan impor kebutuhan mereka dari negara lain. "Ekspor

adalah suatu kegiatan ekonomi menjual produk dalam negeri ke pasar di luar negeri''(Murni, 2009). Keuntungan adanya kegiatan ekspor menurut Sukirno (2010) adalah:

- a. Memperluas Pasar.
- b. Menambah Devisa Negara
- c. Memperluas Lapangan Kerja

### **Supply Chain Management**

*Supply Chain Management (SCM)* mengacu pada aliran material, informasi, uang dan jasa di sepanjang Rantai Pasok. Sebuah *Supply Chain* mencakup organisasi dan proses yang menghasilkan dan mengirimkan produk, informasi, dan layanan untuk konsumen akhir (Rainer Jr dan Cegielski, 2011).

### **Information Sharing and Information Quality**

Menurut Morbeg *et al.* (2002) dalam Jraisat (2010) *Information Sharing* merupakan salah satu komponen dari keseluruhan integrasi antar perusahaan atau departemen dalam Rantai Pasokan. *Information Sharing* di harapkan dapat mempermudah pertukaran informasi secara terbuka yang dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak Cannon and Perreault Jr. (1999) dalam Jraisat (2010).

Selain *Information Sharing*, *Information Quality* merupakan komponen yang penting dalam *Supply Chain Management* (Li and Lin, 2006). *Information Quality* dapat diukur berdasarkan tingkat akurat, kepercayaan, objektivitas, relevansi, ketepatan waktu, kelengkapan dan kesesuaian informasi, konsistensi, aksesibilitas, dan keamanan. Pertukaran informasi dan kualitas informasi yang buruk tidak memadai, berdampak pada ke-efektifan dan efisiensi kinerja Rantai Pasokan (Miller, 2005).

### **Information and Communication Technology in The Supply Chain**

Sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi memberikan pengaruh yang besar dalam Manajemen Rantai Pasokan. Adanya teknologi dapat membantu proses pengambilan keputusan, memantau dan mengendalikan operasi, membuat sistem simulasi, menyimpan dan memproses data dan membantu melancarkan komunikasi baik antar individu, perusahaan maupun mesin Rushton *et al.* (2010).

### **Manajemen Logistik**

Logistik tidak hanya mengacu pada perusahaan manufaktur, melainkan terkait dengan seluruh organisasi termasuk pemerintah misalnya dalam rumah sakit, sekolah, organisasi jasa, bank pengecer dan organisasi jasa finansial. Logistik bersifat bebas terhadap alam, manusia, finansial, maupun sumber informasi sebagai *input* Kusmastuti (2017). Logistik merupakan bagian dari *SCM* yang melakukan perencanaan, implementasi, mengontrol aliran masuk dan keluar, penyimpanan barang, jasa dan informasi terkait titik asal dan titik konsumsi dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan Dong Wook Song (2012) dalam Saraswati (2017). Tujuan utama Logistik yaitu meminimalkan biaya perusahaan dan memaksimalkan kepuasan pelanggan dengan mengkoordinasikan arus bahan dan informasi dengan cara yang paling efisien, tepat waktu dan dengan harga yang semestinya Cooley *et al* (2009) dalam Saraswati (2017). Logistik Maritim merupakan proses perencanaan pelaksanaan pengelolaan pergerakan barang maupun informasi yang ada pada *ocean carriage*.

**Tabel 1.1 Fungsi dan Aktivitas Pendukung Pemain Logistik Maritim**

	<i>Shipping line</i>	Operator Pelabuhan	<i>Freight Forwarder</i>
Fungsi Utama	Memindahkan kargo antar pelabuhan	Penerimaan, pengiriman, <i>loading</i> dan <i>unloading</i> kargo, bongkar muat dan menghubungkan ke transportasi darat.	Pemesanan kapal, mempersiapkan dokumen untuk pengiriman perdagangan melalui jalur laut.
Aktivitas Pendukung Logistik	Dokumen terkait pergadangan laut, <i>container tracking</i> , <i>intermodal service</i> .	Pergudangan, pusat distribusi, percobaan, perakitan, perbaikan, <i>inland connection</i> .	Manajemen persediaan, pengemasan, pergudangan.

Sumber: Song dan Panayides, 2012 dalam Saraswati, 2017

## Penelitian Terdahulu

Ricardianto *et al* (2017) membahas mengenai *Handling Standard Operating Procedure Export Document Ocean Freight* dengan tujuan mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada Standar Operasional Prosedur (SOP) ekspor, hasil penelitian terdapat empat masalah dalam SOP Prosedur Ekspor yaitu: kurangnya SDM, Komunikasi yang buruk antar karyawan dalam menangani dokumen ekspor, sistem jaringan komputer yang bermasalah, lambatnya respon dari pelanggan untuk menanggapi dokumen ekspor.

Mahadika *et al.* (2017) tentang Peran *Indonesia National Single Window (INSW)* Terhadap Penanganan Barang Impor (Studi Kasus pada PT. Otsuka Indonesia, Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *INSW* efektif dalam membantu proses penanganan barang impor di PT. Otsuka Indonesia karena memberi pengaruh yang signifikan dan secara menyeluruh penerapannya sesuai dengan tujuan dibentuknya sistem *INSW* yaitu meningkatkan kecepatan pelayanan dan efektivitas pengawasan, pengurangan biaya dan percepatan waktu serta kinerja seluruh kegiatan yang terkait dengan lalulintas barang ekspor, impor terkait dengan perizinan pengeluaran barang.

Yavuz *et al* (2017) membahas tentang *Facilitating Export & Import Inspection Procedures Through Risk Assessment And Paperless Documentation*. Memperoleh hasil bahwa fasilitasi perdagangan dengan adanya penyederhanaan dan harmonisasi prosedur yang terlibat dalam ekspor impor dalam produk pertanian terutama saat pengurusan dokumen yang diperlukan. Semakin banyak negara yang mengadopsi dan melakukan penyederhanaan dan harmonisasi prosedur ekspor dapat meningkatkan daya saing perdagangan.

Seçkin (2017) yang berjudul *Paperless Trade: Evaluation of the Current Situation & towards the Integrated Single Foreign Trade Document* yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan apa saja yang dihadapi pada pengurusan dokumen internasional melalui elektronik atau simplifikasi prosedur pengurusan dokumen yang terintegrasi menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mendapatkan bahwa proses pengurusan dokumen perdagangan luar negeri dalam satu sistem yang terintegrasi telah dilakukan di berbagai negara seperti Singapura, Hongkong, China, Rep.Korea, Georgia dan masih banyak lagi. Sistem pengurusan dokumen yang terintegrasi dapat memutus rantai regulasi yang begitu panjang dan akan berjalan lancar serta mengurangi penggunaan kertas jika dilakukan secara *online*.

## METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif tujuannya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dalam mengidentifikasi proses pengurusan dokumen perijinan ekspor bagi pihak eksportir dalam hal ini industri pengolahan ikan kaleng di Kota Bitung.

### Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga dalam penelitian ini tidak menggunakan istilah populasi, tetapi dinamakan "*Sosial Situation*" atau situasi sosial. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah di Kota Bitung, di mana yang menjadi informan yaitu perusahaan industri pengolahan ikan kaleng berbahan baku ikan tuna yang ada di Kota Bitung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sugiyono (2017:124) menuliskan bahwa *purposive sampling* didefinisikan sebagai teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan dalam penelitian ini adalah: Pimpinan PT. Samudera Mandiri Sentosa dan Pimpinan PT. Sinar Pure Foods International.

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer di dapatkan dari hasil kunjungan lapangan yaitu melalui wawancara langsung, melakukan diskusi dengan pihak terkait, dan dokumentasi langsung diperoleh dari objek penelitian di perusahaan industri ikan kaleng (PT. Samudra Mandiri Sentosa, Tbk dan PT. Sinar Pure Food International, Tbk) di Kota Bitung. Data Sekunder didapatkan dari berbagai sumber yaitu Bea Cukai, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, internet, buku, skripsi, dan jurnal.

### Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sanusi (2012:105-114) pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

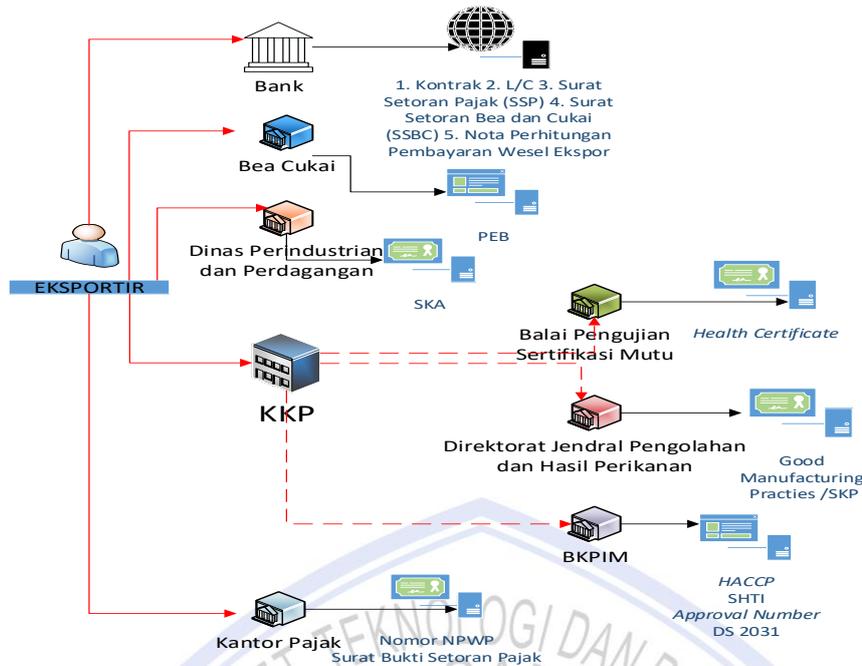
- a. Wawancara  
Cara ini digunakan untuk menggali informasi dengan cara memberikan pertanyaan secara lisan yang relevan dengan tujuan penelitian.
- b. Dokumentasi  
Metode dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Peneliti tinggal menyalin sesuai dengan kebutuhan. Metode ini mendapatkan beberapa dokumen ekspor seperti *HC* dan *COO*. Selain itu di dapat melalui buku maupun sumber bacaan lain seperti buku Seluk Beluk Perdagangan Luar Negeri, buku *Shipping*, buku Efisiensi Pelayanan Publik Melalui INSW, buku Prosedur Ekspor Produk Perikanan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Dalam pelaksanaan ekspor produk perikanan terdapat beberapa pihak yang terlibat diantaranya yaitu:

1. Eksportir  
Pelaku utama dalam perdagangan internasional yaitu eksportir yang merupakan eksportir adalah perusahaan PT. Samudera Mandiri Sentosa dan PT. Sinar Pure Foods International sebagai produsen/pengolahan atau industri perikanan lainnya misalnya penangkapan/pembudidayaan, eksportir agen, ataupun eksportir pedagang.
2. Perbankan  
Dalam proses pelaksanaan ekspor importir mengajukan permintaan pembukaan *L/C* kepada mitra bank devisanya. Begitu juga sebaliknya bagi pihak eksportir akan menerima pemberitahuan pembukaan *L/C*
3. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk  
Dalam menjamin mutu produk agar dapat di ekspor, terutama terhadap produk yang dikonsumsi diperlukan *HC* yang dikeluarkan oleh Otoritas Kompeten di KKP. Selain *HC*, kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan sebagai otoritas kompeten meliputi penerbitan: sertifikat CPIB, sertifikat penerapan *HACCP*, dan sertifikat kesehatan.
4. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi menerbitkan SKP kepada perusahaan pengolahan.
5. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan  
Terdapat persyaratan teknis untuk memasuki negara tujuan yaitu *SPS* yang termasuk dalam Undang-Undang Pangan atau *regulation in food hygiene* di masing-masing negara. Di Indonesia di lingkungan organisasi KKP yang memiliki Otoritas Kompeten dalam menerapkan sistem tersebut adalah BKIPM.
6. Jasa Transportasi (*Freight Forwarder*)  
Sebagai pihak yang melaksanakan pengurusan prosedur dan formalitas dokumentasi lainnya berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah baik negara ekspor, negara transit dan negara impor, yaitu terkait dokumen-dokumen: *LC/Certificate of Receipt/ BL / Sea Waybill/ Air Waybill/ House BL / DO* dan sebagainya, dan beserta biaya dari kegiatan transportasi, penanganan muatan di pelabuhan/gudang.
7. Bea dan Cukai, untuk pembayaran pajak ekspor, mengurus dokumen pendukung lainnya seperti PEB atau PEBT.
8. Perusahaan Asuransi untuk mengurus polis asuransi untuk menutup risiko jika ada kerugian yang terjadi.
9. Lembaga Promosi, agar eksportir memperoleh informasi tentang pasar melalui Direktorat Pemasaran Luar Negeri.
10. Perusahaan Pelayaran (*shipping company*)  
Mengatur pengangkutan dan mengeluarkan *B/L* dan surat bukti muat barang *DO*.
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan pihak yang mengeluarkan SKA atau biasa disebut *COO*.



**Gambar 1. Instansi Yang Terkait Dalam Pengurusan Dokumen**

Sumber: Direktorat Pemasaran Luar Negeri 2014, diolah.

Gambar 1 memperlihatkan eksportir harus berhubungan dengan beberapa lembaga yang terkait dan jika pengurusan dokumen ekspor masih dilakukan secara manual atau belum adanya sistem perijinan *online*, untuk mendapatkan kelengkapan dokumen persyaratan tetap serta dokumen pendukung ekspor harus melalui beberapa instansi serta birokrasi yang panjang karena setiap instansi yang memiliki kewenangan serta prosedur persyaratan yang berbeda-beda hal ini tentunya memerlukan waktu dan biaya yang extra

Bagi eksportir yang bertempat di Kota Bitung pengurusan dokumen dilakukan melalui Pusat Pelayanan Perizinan Publik (Mal Pelayanan Perizinan Publik) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal (*selanjutnya disingkat DPM*) melalui loket OSS dan PTSP. Jadi, pengurusan dokumen yang dikeluarkan baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilayani secara professional transparan, lancar dan waktu yang singkat sehingga mempermudah eksportir dalam memenuhi persyaratan dokumen untuk ekspor.

Berbeda dengan pengurusan dokumen atau perijinan di Kota Bitung, di tingkat Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Prosedur Ekspor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Utara, kepengurusan dokumen ekspor belum terintegrasi baik secara *online* atau DPM Provinsi Sulawesi Utara. Pengurusan dokumen ekspor dilakukan langsung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui loket khusus yang disediakan oleh bidang Perdagangan Luar Negeri berdasarkan SOP yang berlaku sehingga kepengurusan dokumen berjalan dengan baik dan lancar.



**Gambar 2. Gambaran Proses Pengurusan Dokumen Ekspor di Tingkat Provinsi**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut, diolah

Gambar 2 memperlihatkan bahwa di tingkat Provinsi dalam proses pengurusan dokumen perijinan ekspor, eksportir masih harus berhubungan dengan dinas yang berwenang secara terpisah, meskipun proses pengurusan terbilang lancar, namun hal ini belum termasuk efisien jika dibandingkan dengan proses pengurusan dokumen yang sudah terintegrasi di Mal Pelayanan Publik di Kota Bitung.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan data dan informasi yang di dapat potensi sumber daya alam yang dimiliki Kota Bitung menjadi salah satu tempat terkonsentrasinya industri pengalangan ikan di Indonesia berbahan baku ikan tuna. Setengah dari 14 (empat belas) industri pengalangan ikan yang ada di Indonesia yang aktif melakukan ekspor, 7 (tujuh) di antaranya terletak di Kota Bitung. Namun saat ini, kinerja industri perikanan di Kota Bitung menurun yang disebabkan oleh adanya kebijakan moratorium *transshipment* dan proses perijinan kapal (SIPI) yang memakan waktu yang lama. Sehingga tersisa 3 (tiga) industri perikanan yang ada di Kota Bitung yang aktif melakukan ekspor ikan kaleng yaitu perusahaan; PT. Samudera Mandiri Sentosa, PT. Sinar Pure Food Ind, dan PT. Delta Indo Tuna. Hal ini dijelaskan dalam penelitian Wullur, 2016 terkait *Global Value Chain* dalam Laporan Kinerja Industri Perikanan Provinsi Sulawesi Utara tantangan yang di hadapi oleh industri perikanan yaitu:

1. Pasokan bahan baku yang kurang karena adanya regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah terkait kemudahan izin usaha, kemudahan birokrasi dan kelembagaan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mendukung
2. Kurangnya infrastruktur dan pasokan listrik
3. Kurangnya tenaga kerja professional.

Di mana tantangan terkait regulasi menjadi prioritas yang perlu di perhatikan agar industri perikanan di Provinsi Sulawesi Utara dapat meningkatkan posisinya dalam *Global Value Chain*.

Dalam peningkatan *Global Value Chain* industri perikanan pelaksanaan ekspor produk perikanan harus menyediakan dokumen-dokumen berupa *L/C* yang di keluarkan oleh bank devisa, surat PEB yang di keluarkan oleh Bea dan Cukai, SKA atau biasa yang disebut dengan *COO* yang di keluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, IUP dan SIPI beserta dokumen pendukung lainnya yang berhubungan langsung dengan KKP berupa dokumen *GMP*, *HACCP*, *Approval Number* khusus untuk ekspor ke Eropa, *HC*, *SHTI*.

Mengacu pada sisi informan pada saat wawancara dapat disimpulkan industri pengalangan ikan di Kota Bitung yaitu perusahaan PT. Samudera Mandiri Sentosa dan PT. Sinar Pure Food International bahwa kedua perusahaan tersebut masih aktif melakukan ekspor namun jumlah ekspor ikan kaleng tidak banyak jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Tahun 2014-2015) yang di akibatkan oleh penurunan kinerja produksi perusahaan akibat kurangnya pasokan bahan baku. Pasokan bahan baku berkurang disebabkan adanya moratorium dan proses pengurusan dokumen SIPI yang lama sehingga kapal tidak dapat beroperasi untuk menangkap ikan. Terkait dokumen-dokumen ekspor pengurusan sudah dilakukan secara *online* sehingga cukup efektif dan efisien hanya saja kelemahan pada sistem OSS yang down sehingga terjadinya penundaan pengurusan dokumen serta untuk mengekspor ke pasar Uni Eropa dan US UPI memerlukan dokumen pendukung berupa SHTI. Bagi UPI, untuk mendapatkan SHTI memerlukan waktu yang tidak menentu karena dalam proses pembuatan SHTI harus di proses terlebih dahulu oleh industri penangkapan untuk mendapatkan lembar awal kemudian UPI bisa melanjutkan ke proses selanjutnya untuk mendapatkan lembar turunan kemudian SHTI dikeluarkan.

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh Yavuz *et al.* (2017) yang menjelaskan bahwa dalam mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di Asia-Pasifik, perlu adanya fasilitasi dalam perdagangan berupa penyederhanaan dan perlu adanya sinkronisasi prosedur dari pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ekspor-impor. Adanya sistem *TAREKS* yang merupakan metode baru dalam inspeksi ekspor-impor yang berbasis elektronik sehingga dapat mengurangi mengurangi volume pemeriksaan fisik dan dokumentasi barang impor dan ekspor sehingga meningkatkan efisiensi prosedur karena penggunaan kertas berkurang, proses dan pemantauan yang lebih cepat.

## PENUTUP

### KESIMPULAN

Pengurusan dokumentasi barang ekspor secara terintegrasi dalam sistem *online* dapat memutus rantai birokrasi yang panjang, menghemat waktu, dan biaya hal ini menjadikan prosedur ekspor menjadi lebih efisien. Proses pengurusan dokumen ekspor di Kota Bitung sudah di lakukan secara *online* dapat di proses dalam Pusat Pelayanan Terpadu Kota Bitung atau secara mandiri dalam *Online Single Submission (OSS)* sehingga pengurusan dokumen menjadi lebih lancar, transparan, dan dilakukan dalam waktu yang singkat.

**SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi *Stakeholder* yang terlibat sebaiknya mentaati setiap proses administrasi yaitu dengan selalu mengurus setiap kelengkapan dokumen sehingga tidak terjadi lagi penundaan pengurusan dokumen yang memakan waktu tidak menentu dan dapat saling berkontribusi secara tidak langsung dalam produktivitas ekspor industri pengolahan ikan kaleng.
2. Bagi Pemerintah, akan lebih baik jika adanya sinkronisasi kesatuan dari K/L yang terlibat terkait dengan pengeluaran perijinan ekspor dalam satu sistem. Serta pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara proses pengurusan dokumen terintegrasi dilayani secara terpisah di OSS dan PTSP untuk proses pengurusan dokumen ekspor, pelayanan perijinan investasi, atau kepengurusan surat lainnya sehingga efisiensi proses perijinan ekspor dapat di gambarkan sebagai berikut.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Fitriana M.D (2018) Analisis Efisiensi Produksi Usahatani Ubi Kayu Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Skripsi. Fakultas Pertanian Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Hariyono, W. (2016). Warta Ekspor Edisi II Efisiensi Pelayanan Publik Melalui INSW. Jakarta. Penerbit: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Inggar. (2019). *Simplifikasi Prosedur Ekspor*.  
<https://www.kompasiana.com/nandainggar/5c91c8ab95760e5e8406a082/simplifikasi-prosedur-ekspor-akankah-terrealisasi?page=all>. Diakses pada 15 Januari 2020.
- Jraisat, L.E. (2010). *Information Sharing In An Export Supply Chain Relationship: The Case Of The Jordanian Fresh Fruit And Vegetable Export Industry. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy. Brunel Business School Brunel University, West London.*
- Kusmastuti D. dan Sugiyama G.A. (2017). Manajemen Logistik Organisasi Publik Edisi 2. Tangerang. Penerbit: Universitas Terbuka
- Li S, Lin B (2006). Accessing information sharing and information quality in supply chain management. *Decision Support Syst.*, 42: 1641-1656  
[https://www.academia.edu/22703027/Accessing\\_information\\_sharing\\_and\\_information\\_quality\\_in\\_supply\\_chain\\_management](https://www.academia.edu/22703027/Accessing_information_sharing_and_information_quality_in_supply_chain_management)
- Mahadika D., Suharyono Suharyono, M. Kholid Mawardi. (2017) Peran Indonesia Nasional Single Window (INSW) Terhadap Penanganan Barang Impor Studi Kasus Pada PT. Otsuka Indonesia, Malang. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 42 No.1.*  
<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1656>
- Miller H (2005). *Information quality and market share in electronic commerce*. *J. Services. Mark.*, 19(2): 93-102.
- Murni, A. 2009. *Ekonomika Makro*. Bandung: PT Refika Aditama
- Parikesit D. dkk. (2018). *Infrastruktur Penunjang Ekspor Nasional. Policy Brief*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Pusat Studi Transportasi dan Logistik.
- Rainer Jr.,R.K., and Cegielski, C. G. (2011). *Introduction Information Systems: Supporting and Transforming Business. USA: John Wiley and Sons, Inc.*
- Ricardianto. P, A. Setiawan, A. Pujianto (2015). *Handling Standard Operating Procedure Export Document Ocean Freight. Jurnal Manajemen Transportasi and Logistik (JMTransLog) - Vol. 02 No. 01. ISSN 2355-4721.*

Rushton A., Phil Croucher, Peter Barker (2010). *The Handbook Of Logistics & Distribution Management. 4th Edition. Kogan Page: London Phila Delphia, New Delhi.*

Saraswati A. (2017). *Membangun Supply Chain Resilience Dengan Pendekatan Quality Function Deployment Pada Pt Bimasco Cargo System.* Skripsi. Fakultas Bisnis dan Manajemen Teknologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya.

Seçkin, N. (2017). Paperless Trade: Evaluation of the Current Situation & towards the Integrated Single Foreign Trade Document. *Journal Of Management Research.* Vol. 9. No. 2. ISSN: 1941-899X. [https://www.researchgate.net/publication/313484802\\_Paperless\\_Trade\\_Evaluation\\_of\\_the\\_Current\\_Situation\\_towards\\_the\\_Integrated\\_Single\\_Foreign\\_Trade\\_Document](https://www.researchgate.net/publication/313484802_Paperless_Trade_Evaluation_of_the_Current_Situation_towards_the_Integrated_Single_Foreign_Trade_Document). Diakses 20 Januari 2020.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R and D.* Bandung: CV. Alfabeta.

Tuerah, N. (2019). *Bunga Rampai Rekomendasi Kebijakan. Edisi II.* Jakarta: Penerbit Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Yavuz, K., E. Kırıcıoğlu., and D. Özdemir. (2017). *Facilitating Export and Import Inspection Procedures Through Risk Assessment And Paperless Documentation (The Turkish Risk-Based Trade Control System (TAREKS)). Brief No.20.* <https://www.unescap.org/sites/default/files/UNNEExT%20Brief%20No.20.pdf>

